

RETROSPEKSI KEBIJAKAN PANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA MEMENUHI POLA PANGAN HARAPAN

Unggul Priyadi

Abstract

The food policy applied by government is focused on the increase of rice. One achievement of the policy establishment is the rice swasembada in 1984. However, after that, rice production decrease while other food commodities do not have enough support from government. As a result to fulfill the national food, the government does import.

The limited number of domestic food production really gives influence on creating national food stability, especially to fulfill Pola Pangan Harapan. In order to fulfill Pola Pangan Harapan the government must formulate their policy in agriculture sector.

Key words: *policy, Pola Pangan Harapan, and food stability*

PENDAHULUAN

Pembangunan jangka panjang tahap pertama yang dilaksanakan pemerintah telah berakhir, selanjutnya diikuti oleh pembangunan jangka panjang tahap kedua. Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan jangka panjang ini pada dasarnya adalah upaya mempercepat proses transformasi struktural dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern. Secara tradisional transformasi struktural antara lain ditandai dengan penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto.

Dalam perjalanan pembangunan ekonomi, peran sektor pertanian masih penting. Peranan tersebut paling sedikit mencakup empat aspek: *pertama* kemampuan menyediakan pangan bagi masyarakat; *kedua*, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat; *ketiga* menghemat dan menghimpun devisa negara; *keempat* memberikan dukungan sebagai landasan berkembangnya sektor lain dalam kegiatan ekonomi (Gunawan, 1987).

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan pertanian, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut secara garis be-

sar berupa kebijakan peningkatan produktivitas dan harga hasil produksi "*price support*" serta kebijakan dalam faktor produksi melalui "*input subsidy*".

Pengembangan usaha tani secara khusus dilakukan dengan "*supply led agricultural development*". Melalui strategi ini kebijakan diarahkan dan dipusatkan pada peningkatan produktivitas dan produksi pangan melalui peningkatan teknologi, peningkatan kualitas bibit, dan pemupukan (*seed-fertilizer technology*), di samping adanya peningkatan ekstensifikasi/perluasan dan pencetakan areal sawah yang didukung pembangunan irigasi (Bungaran, 1993). Adapun untuk mendorong peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang diarahkan pada tercapainya swasembada, operasionalisasi kebijakan diwujudkan dalam subsidi faktor produksi berupa pupuk, bibit, pengadaan air irigasi dan pengamanan harga hasil produksi berupa penetapan harga dasar.

Melalui pengembangan kebijakan yang telah dilakukan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan sehingga mampu mene-

kan impor pangan. Selanjutnya hal ini akan mengurangi defisit transaksi berjalan, menciptakan lapangan kerja bagi kebanyakan masyarakat tani di wilayah pedesaan, serta meningkatkan pendapatan petani sehingga mampu mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan.

Hasil yang dicapai dari berbagai formulasi kebijakan yang berkaitan dengan pangan khususnya beras pada tahun 1984, Indonesia mampu mencapai swasembada beras (yang dalam sepanjang sejarah baru pertama kali). Beras menjadi cerita keberhasilan yang didominasi oleh pertumbuhan lahan/sawah. Keberhasilan mencapai swasembada beras didukung adanya laju pertumbuhan yang cepat dalam produktivitas pada satu sisi, namun di sisi lain terjadi laju pertumbuhan areal yang lambat. Peningkatan produktivitas didukung oleh keberhasilan dalam program intensifikasi yang ditunjang irigasi yang baik (Darwanto, 1998).

Secara historis keberhasilan berswasembada beras merupakan hasil rangkaian kebijaksanaan yang telah dilakukan pemerintah sejak pemerintahan Orde Lama. Bermula pada tahun 1952 dengan Rencana Kemakmuran Kasimo, dilanjutkan Program Padi Sentra, kemudian Program Demonstrasi Masal (1961), Program Bimbingan Masal (BIMAS) Program Intensifikasi Masal (INMAS) semenjak 1969, Program Intensifikasi Khusus (INSUS) pada tahun 1979 dan Program Supra Insus semenjak tahun 1984.

Dalam perkembangannya, tercapainya swasembada beras relatif rentan terhadap faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor eksternal meliputi: iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, dan gejolak pasar. Adapun termasuk dalam faktor internal adalah keterbatasan lahan dan tingkat produktivitas. Untuk mengantisipasi kerentanan ketersediaan pangan dalam upaya mewujudkan terpenuhinya Pola Pangan Harapan, maka kebijakan di bidang pangan lebih diarahkan pada terwujudnya sistem

ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga sampai tingkat nasional.

POLA PANGAN HARAPAN

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH dapat dinyatakan dalam bentuk komposisi energi (kalori), keanekaragaman pangan dan/atau dalam bentuk komposisi berat (gram atau kg) keanekaragaman pangan yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Dengan demikian, PPH mencerminkan susunan komposisi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya agama dan citarasa (Kan Wil Pertanian DIY, 1999).

Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi sembilan kelompok pangan yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok lain-lain. Nilai skor PPH berkisar antara 0-93, dengan skor 93 merupakan skor yang diharapkan.

Komposisi kebutuhan pangan dalam PPH untuk mewujudkan hidup sehat tanpa mempertimbangkan apakah pangan tersebut berasal dan produksi lokal atau didatangkan dan negara/daerah lain (impor). Untuk menjadikan PPH sebagai instrumen dan pendekatan dalam perencanaan ketersediaan di suatu daerah, diperlukan kesepakatan tentang pola konsumsi energi dan pangan dengan mempertimbangkan: (1) pola konsumsi pangan penduduk, (2) kebutuhan gizi yang dicerminkan oleh pola kebutuhan energi, (3) mutu gizi makanan yang dicerminkan oleh kombinasi makanan yang mengandung protein hewani, sayur dan buah, (4) pertimbangan masalah gizi dan penyakit yang berkaitan dengan gizi, (5) kecenderungan permintaan/daya beli, (6) kemampuan penyediaan dalam konteks ekonomi dan wilayah.

Susunan PPH di Indonesia disusun ber-

dasarkan pengalaman FAO – RAPA (FAO–Regional Asia Pasific) yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan berbagai kondisi. Kondisi-kondisi tersebut mencakup: iklim, geografi, genetik, sosial ekonomi, budaya dan gaya hidup penduduk Indonesia yang komposisinya ditetapkan pada tabel 1.

Dalam susunan PPH tersebut di atas terdapat nilai bobot setiap kelompok bahan pangan/komoditas. Pemberian bobot untuk setiap kelompok pangan didasarkan pada beberapa kriteria tertentu yang memperlihatkan kecukupan gizi, keanekaragaman dan keseimbangan bahan pangan.

KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan, secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Kecukupan pangan mencakup segi kuantitas dan kualitas baik dari produksi sendiri maupun membeli di pasar internasional. Terwujudnya sistem ketahanan pangan diindikasikan antara lain dari ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau daya beli masyarakat serta terwujudnya diversifikasi pangan dari sisi produksi dan sisi

konsumsi (Darwanto, 1998). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di bidang pangan diarahkan pada upaya peningkatan swasembada pangan yang berorientasi ketersediaan pangan secara luas yang mencakup: beras dan jenis-jenis komoditi strategis lainnya seperti palawija dan hasil perikanan dan peternakan.

Adanya orientasi kebijakan pangan yang menitikberatkan pada padi, menjadikan setiap terjadinya kegagalan panen padi berakibat pada instabilitas ketersediaan pangan nasional. Dalam mendukung ketersediaan pangan yang dihadapkan pada terbatasnya pasokan beras produksi dalam negeri pemerintah mengambil kebijakan impor. Keadaan ini menjadi ironis, mengingat Indonesia sebagai negara Agraris yang memiliki tanah subur serta sebagai negara kepulauan yang menyimpan potensi kelautan yang berlimpah, namun demikian ternyata masih menyimpan masalah yang krusial mengenai masalah ketahanan pangan dalam arti luas maupun dalam arti sempit khusus beras.

Adapun realisasi jumlah beras impor akibat terbatasnya produksi dalam negeri disajikan pada tabel berikut pada tabel 2

Tabel 1
Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional

NO	BAHAN MAKANAN	% KALORI	BOBOT	SKOR
1.	Padi-padian	50.0	0.5	25.0
2.	Umbi-umbian	5.0	0.5	2.5
3.	Pangan Hewani	15.3	2.0	30.6
4.	Minyak dan Lemak	10.0	1.0	10.0
5.	Buah/Biji berminyak	3.0	0.5	1.5
6.	Kacang-kacangan	5.0	2.0	10.0
7.	Gula	6.7	0.5	3.4
8.	Sayur dan Buah	5.0	2.0	10.0
9.	Bumbu-bumbu	0.0	0.0	0.0
Jumlah		100.0	9.0	93.0

Sumber: Kanwil Pertanian DIY, 1999.

Tabel 2
Areal Panen, Produksi dan Impor Beras

Tahun	Areal (ribu ha)	Produksi (ribu ton)	Pertumbuhan (persen)	Impor (ribu ton)
1990	10.502	45.179	1,0	29
1991	10.282	46.689	-1,1	178
1992	11.103	48.240	7,9	634
1993	11.013	48.181	-0,1	0
1994	10.734	46.641	3,2	876
1995	11.439	49.744	6,7	3.014
1996	11.569	51.101	2,7	1.090
1997	11.141	49.377	-3,7	406
1998	11.613	48.472	-4,9	5.765
1999	11.963	50.866	1,8	4.183
2000	11.793	51.898	3,9	1.513
2001	11.415	50.181	-3,4	1.513*

*:perkiraan

Sumber : *Kompas* 6 Agustus 2001 hal.15.

Di samping melakukan impor beras, ternyata sektor pertanian tidak mampu mencukupi pasokan komoditas pangan yang lain. Oleh karenanya, pemerintah melakukan impor sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan. Dalam perkembangannya nilai impor beberapa komoditas pertanian non beras nilainya melebihi nilai impor beras. Hal ini memberikan indikasi bahwa strategi pengembangan sektor pertanian (yang selama ini memfokuskan pada beras) masuk pada perangkap yang tidak menguntungkan. Pada satu sisi komoditas beras pada saat tertentu harus tetap diimpor, sementara komoditas pertanian yang lain sudah terlanjur kurang optimal dalam penanganannya sehingga harus diimpor.

Ketergantungan impor menjadi semakin tidak terelakan, karena beberapa komoditas pertanian non beras seperti: gandum, jagung, dan kedelai sudah menjadi bahan baku industri yang sangat strategis. Oleh karenanya ketergantungan terhadap impor komoditas pertanian non beras sudah menjadi kebutuhan pokok dalam mengembangkan industri yang berbasis sektor pertanian. Ilustrasi besarnya

volume impor komoditas pertanian tahun 2000 disajikan dalam tabel 3.

Dampak terjadinya impor pangan menjadikan defisit pada transaksi berjalan semakin membengkak. Salah satu penyebab terjadinya impor pangan adalah lambatnya pertumbuhan produksi pangan dibandingkan kebutuhan konsumsi pangan nasional. Terlebih pada 2 tahun terakhir penurunan produksi terjadi secara signifikan. Ilustrasi penurunan produksi disajikan dalam tabel 4. Besarnya impor yang menguras devisa sangat besar menjadi suatu hal yang sangat ironis, mengingat sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian dan dalam perjalanan sejarah negara kita menyatakan sebagai negara agraris. Terlebih sebagian komoditas impor didatangkan dari negara yang areal pertanian relatif lebih sempit.

Semakin lemahnya sistem ketahanan pangan akan diperburuk lagi dengan semakin menurunnya kegairahan petani untuk melakukan usaha tani tanaman pangan yang, sebab meningkatnya harga input yang tidak sebanding dengan peningkatan harga komoditas perta-

nian yang diterima petani. Kondisi ini sangat menguntungkan dalam konstelasi perdagangan dunia. Indonesia dengan penduduk sekitar 220 juta jiwa, apabila rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun sekitar 140/kg maka dibutuhkan pasokan beras 30.800 juta kg per tahun. Suatu jumlah yang sangat menarik untuk dijadikan target pasar beras dunia. Rapuhnya ketahanan pangan sangat mungkin dimanfaatkan sebagai peluang bagi produsen hasil pertanian dunia. Demikian halnya para pengusaha domestik dengan berbagai cara memasukan komoditas beras termasuk komoditas-komoditas pertanian lain.

Krisis pangan yang terjadi sebenarnya sudah dapat terindikasikan ketika pada tahun 1995 "Food and Agriculture Organization" (FAO) dalam peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) mengumumkan Indonesia men-

jadi salah satu dari 88 negara yang termasuk dalam kategori "Low Income Food Countries" (LIFS /negara yang berpendapatan rendah kurang pangan). Dua tahun kemudian pada peringatan HPS 1997, FAO kembali mengingatkan terdapat 800 juta jiwa penduduk dunia termasuk Indonesia mengalami kurang pangan. Prediksi FAO ini tidak berlebihan, sebab kondisi ekonomi masyarakat makin memprihatinkan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga gejala kurang gizi dan kelaparan yang berada pada berbagai pelosok tanah air. Gejala anak menderita kurang gizi akibat krisis ekonomi sangat mungkin akan berubah menjadi "marasmus kwashiorkor" (busung lapar), yang sejak tahun 1973 dinyatakan lenyap dari bumi Indonesia.

Tabel 3
Volume Dan Nilai Impor Komoditas Pangan Tahun 2000

No	Komoditas	Volume (ton)	Nilai (dollar AS)
1	Gandum	3.576.665	500.312.470
2	Jagung	1.236.764	150.012.707
3	Beras	550.514	131.132.613
4	Biji kedelai	1.277.685	275.481.226
5	Bungkil kedelai	1.262.040	268.746.270
6	Kacang tanah	111.284	35.601.270
	Jumlah	8.014.952	1.361.287.062

Jika kurs Rp 8.700 per dollar AS, nilai impor enam komoditas itu setara dengan Rp 11,8 triliun.
Sumber: HKTI, dalam *Kompas*, 12-9-2001 hal.15

Tabel 4
Produksi Padi Dan Palawija Tahun 2000 Dan Prediksi Tahun 2001 (Dalam Juta Ton)

Komoditas	2000	2001	Perubahan (%)
Padi (GKG)	51,89	50,18	-3,31
Jagung	9,67	9,29	-3,92
Kedelai	1,01	0,92	-9,27
Kacang tanah	0,73	0,70	-3,66
Kacang hijau	0,28	0,34	20,41
Ubi jalar	1,82	1,61	-11,90
Ubi kayu	16,08	15,60	-3,01

Sumber: BPS, dalam *Kompas* 12-9-2001, hal. 15

Menurut data Susenas 1999, di Indonesia terdapat sekitar 23 juta anak balita. Dari jumlah tersebut sekitar 1,8 juta anak (8 persen) menderita gizi buruk dan 5,2 juta anak (26 persen) menderita gizi kurang. Selain itu, diperkirakan tidak kurang 3,3 juta anak balita yang berat badannya masih dibawah normal, 1,1 juta diantaranya berusia 6-23 bulan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat konsumsi energi dan protein yang memang masih sangat rendah. Di samping itu, hasil survey tahun 1999 anak-anak yang berusia 24-29 bulan merupakan kelompok yang paling banyak menderita gizi buruk dan gizi kurang. Pada kelompok umur ini angka prevalensi gizi buruk mencapai 12 persen sedangkan gizi kurang 32 persen, sedangkan dampak dari gizi buruk dan gizi kurang. Pada kelompok ini tidak saja mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak serta mengurangi tingkat kecerdasan anak tetapi akibat yang lebih parah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah "*lost generation*".

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERTANIAN

Pengalaman dalam peningkatan produksi pangan yang selama ini hanya berorientasi pada komoditi beras dan kurang memperhatikan komoditas pangan yang lain berdampak pada lemahnya ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung dan memperkuat ketahanan pangan maka perhatian pembangunan pertanian harus terdispersi secara proporsional pada berbagai komoditas pertanian. Hal ini akan mendorong pertumbuhan produksi berbagai komoditas pertanian sehingga ketahanan pangan dapat terwujud secara berkelanjutan. Oleh karenanya, sektor pertanian diformulasikan dalam perspektif makro dan mikro secara utuh di tengah gencarnya tuntutan liberalisasi.

Dalam perspektif makro, untuk sub tanaman pangan, kebijakan diarahkan untuk mampu sekaligus mencakup tiga agenda, yakni: pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dengan basis ekonomi perdesaan dan stabilitas ketahanan pangan.

Ilustrasi perkembangan produksi berbagai komoditas pertanian yang mampu untuk dikembangkan dalam mendukung ketahanan pangan disajikan pada tabel 5.

Untuk mewujudkan terciptanya ketahanan pangan di masa mendatang maka petani sebagai produsen harus dihindarkan pada posisi sebagai pendukung pembangunan sektor industri seperti yang telah berlangsung dalam dasa satu-dua warsa terakhir. Peran dan posisi petani harus dihindarkan sebagai "pelindung" para industrialis, melainkan harus mampu berkembang untuk bersaing di pasar internasional sehingga sektor pertanian mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang tengah dilanda krisis.

Di saat krisis, sektor pertanian adalah penyedia lapangan kerja bagi tenaga kerja yang menganggur karena dampak krisis. Kenyataan yang terpampang selama krisis memberi pencerahan bahwa sektor pertanian mampu mengurangi beban tekanan akibat krisis dan tetap bertahan memberikan kontribusi pada penerimaan devisa, meskipun tertatih-tatih. Sebagai ilustrasi kontribusi sektor pertanian dalam perolehan devisa dalam masa krisis disajikan pada tabel 6.

Mencermati besarnya nilai ekspor komoditas pertanian (tabel 6) dibandingkan dengan nilai impor komoditas pangan (tabel 2), menunjukkan adanya defisit cukup besar. Kondisi ini menunjukkan indikasi yang semakin jelas adanya sinyal yang kurang menguntungkan dalam mengembangkan pertanian dalam perolehan devisa. Dalam beberapa tahun terakhir, bersamaan depresiasi rupiah, ternyata terjadi kecenderungan nilai ekspor yang menurun pada beberapa komoditas andalan ekspor. Hal ini menunjukkan perubahan kurs yang tidak menjamin otomatisasi meningkatnya nilai ekspor komoditas pertanian. Indikator ini memberikan sinyal betapa pentingnya perhatian variabel di luar variabel ekonomi dalam mendukung ekspor, di samping perlunya mencermati tingkat kompetisi di pasar internasional.

Tabel 5
Produksi Komoditas Pertanian
(ribu ton)

Komoditas	1990	1995	1998	1999	2000
Tanaman Pangan					
Padi	45.179	49.744	49.200	50.866	51.898
Jagung	6.734	8.246	10.169	9.204	9.677
Ubikayu	15.830	15.441	14.696	16.459	16.089
Kedelai	1.487	1.680	1.306	1.383	1.018
Perkebunan					
Karet	1.275	1.573	1.661	1.715	1.752
Kepala dalam	2.332	2.704	2.778	2.789	2.778
Kopi	413	450	514	511	495
Kelapa Sawit	2.413	4.480	5.640	5.989	5.771
Gula	2.119	2.077	1.929	1.907	2.093
Perikanan					
Perikanan Laut	2.370	3.293	3.490	3.950	4.076
Perikanan Tawar	793	971	967	1.020	1.041
Kehutanan					
Kayu Bulat	24.409	24.027	19.027	20.620	13.798
Kayu Gergajian	3.919	1.730	2.707	2.060	3.021
Kayu Lapis	8.843	8.066	7.155	4.612	3.711

Sumber: BPS & World Bank, dalam *Kompas*, 3-12-01 hal 44

Tabel 6
Ekspor Hasil Pertanian
(Juta Dollar AS)

Tahun	Kopi	Teh	Rempah- Rempah	Biji Coklat
1995	595.6	85.6	214.4	224.5
1996	588.8	109.3	157.7	263.0
1997	503.5	84.6	234.6	295.1
1998	578.9	108.3	277.6	382.6
1999	458.7	92.1	373.6	295.8
2000	311.7	108.3	314.5	235.7
2001*	42.6	26.4	37.6	42.2

Sumber : BPS dan Gapmmi, dalam *Kompas*, 2-10-2001, hal. 27

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan industri berbasis pertanian maka diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pangan baik secara nasional maupun regional dengan memperhatikan keunggulan komparatif daerah. Untuk itu, reorientasi kebijakan pertanian hendaknya diarahkan pada upaya-upaya (Darwanto, 1998):

1. Peningkatan produksi yang mempertimbangkan kuantitas dan kualitas produksi yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, sekaligus mampu meringankan kemiskinan
2. Pengembangan komoditi-komoditi pertanian yang memperhatikan karakteristik sumberdaya dan keunggulan kompetitif dan komparatif. Dengan demikian penggunaan sumberdaya setempat, yang meliputi sumberdaya hayati, fisik dan manusia, dilakukan secara optimal dan efisien
3. Pembinaan yang mengarahkan dan memberikan kesempatan pada petani serta masyarakat pedesaan agar berperan dan mampu melaksanakan agribisnis dan agro-industri yang didasarkan pada potensi daerah.
4. Pemberian fasilitas informasi pasar, baik nasional maupun internasional, yang transparan pada petani sebagai pelaku bisnis di bidang pertanian.
5. Investasi pembangunan irigasi dengan mempertimbangkan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk areal pertanian tanaman pangan dengan menghindari peningkatan produksi di daerah irigasi yang mengarah pada monokultur sepanjang tahun tanpa mempertimbangkan aspek agro-ekosistem lainnya

6. Pemberian subsidi sarana produksi secara selektif, yaitu pada komoditi-komoditi strategis untuk kebutuhan dalam negeri terutama pangan yang dilakukan oleh petani kecil
7. Penyediaan kredit usahatani tidak terbatas hanya pada tanaman tertentu saja tetapi juga pada usahatani komoditi lainnya yang berorientasi bisnis sehingga dapat memberikan insentif para petani.

PENUTUP

Pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di sektor pertanian, tetapi sangat dipengaruhi oleh dukungan sektor lain. Kebijakan makro yang ditetapkan akan menjadi arah pergerakan secara simultan. Dalam upaya meningkatkan produksi pangan khususnya beras, penetapan Harga Dasar Gabah (HDG) tanpa dukungan sektor lain tidak berarti banyak sebagai instrumen membentuk ketahanan pangan nasional.

Strategi pemberdayaan pertanian dalam perannya untuk mewujudkan terpenuhinya Pola Pangan Harapan dan mendukung tersedianya pasokan bahan baku industri harus bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan pasar domestik maupun pasar internasional. Selain itu arah dan strategi pembangunan pertanian diharapkan dapat mengarahkan sektor pertanian agar mampu menjadi penggerak ekonomi serta tidak menambah beban pada defisit transaksi berjalan sehingga sektor pertanian ikut mendorong ke luar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2000), "Harga Dasar Beras dan Pupuk di Indonesia", *Kompas*, Jakarta.
- , (1999), *Hasil Analisa Ketersediaan dan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan di DIY*, Kantor Wilayah Pertanian DIY
- Abbas, Syamsudin., (1997), *Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung*, Jakarta, Sekretariat Badan Pengendali Bimas. Departemen Pertanian.
- Anwar. Affendi, (1994), "Kajian Kelembagaan Menunjang Pengembangan Agribisnis", *Makalah Seminar Nasional*, IPB Bogor.
- Darwanto. Dwidjono Hadi, (1998), "Peningkatan Mutu Intensifikasi Pangan Melalui Reorientasi Program Bimas/Penyuluhan". *Makalah penunjang pada Semiloka Nasional Perguruan Tinggi Pertanian Menjawab Tantangan Krisis Pangan Nasional di IPB*, Bogor tanggal 13-14 Juli 1998.
- Dilon, HS. (1999), *Pertanian Membangun Bangsa*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Hill, Hal. (2001). (Terjemahan). *Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Reintjes. Coen, Et All, (2001), *Pertanian Masa Depan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Soekartawi, (1996), *Pembangunan Pertanian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumodingrat, Gunawan, (2001), *Menuju Swasembada Pangan*, Jakarta, Griya Visi Mandiri.
- Wahono. Francis, (2000), *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.